SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 9 Agustus 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulukumba

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
8. Tahun Anggaran 2024 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp1.592.984.245.360,00 (satu triliun lima ratus Sembilan puluh dua milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp136.255.271.180,00 (seratus tiga puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp1.729.239.516.540,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Daerah | | |
| | a. Semula | Rp | 1.592.984.245.360,00 |
| | b. Bertambah/(berkurang) | Rp | 89.698.963.625,00 |
| | Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp | 1.682.683.208.985,00 |
| 2. | Belanja Daerah | | |
| | a. Semula | Rp | 1.592.984.245.360,00 |
| | b. Bertambah | Rp | 136.255.271.180,00 |
| | Jumlah Belanja Setelah Perubahan | Rp | 1.729.239.516.540,00 |
| | Surplus/(Depisit) Setelah Perubahan | Rp | (46.556.307.555,00) |
| 3. | Pembiayaan Daerah | | |
| | a. Penerimaan Pembiayaan | | |
| | 1) Semula | Rp | 0,00 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 46.556.307.555,00 |
| | Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp | 46.556.307.555,00 |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | 1) Semula | Rp | 0,00 |
| | 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan | Rp | 46.556.307.555,00 |
| | Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | | |
| | 1) Semula | Rp | 247.462.000.000,00 |
| | 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 6.035.076.685,00 |
| | Jumlah Pendapatan Asli daerah Setelah Perubahan | Rp | 253.497.076.685,00 |
| b. | Pendapatan Transfer | | |
| | 1) Semula | Rp | 1.344.814.245.360,00 |
| | 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 79.438.902.030,00 |
| | Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan | Rp | 1.424.253.147.390,00 |
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | |
| | 1) Semula | Rp | 708.000.000,00 |
| | 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 4.224.984.910,00 |
| | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan | Rp | 4.932.984.910,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Pajak Daerah | | |
| | 1) Semula | Rp | 78.320.354.000,00 |
| | 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp | 78.320.354.000,00 |
| b. | Retribusi Daerah | | |
| | 1) Semula | Rp | 26.864.950.175,00 |
| | 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | (92.508.000,00) |
| | Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | Rp | 26.772.442.175,00 |
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | |
| | 1) Semula | Rp | 5.000.000.000,00 |
| | 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | (1.274.666.277,00) |
| | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan | Rp | 3.725.333.723,00 |
| d. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | |
| | 1) Semula | Rp | 137.276.695.825,00 |
| | 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 7.402.250.962,00 |
| | Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp | 144.678.946.787,00 |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Transfer Pemerintah Pusat | | |
| | 1) Semula | Rp | 1.251.944.631.000,00 |
| | 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | (7.868.997.970,00) |
| | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan | Rp | 1.244.075.633.030,00 |
| b. | Transfer Antar Daerah | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp | 92.869.614.360,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 87.307.900.000,00 |
| Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan | Rp | 180.177.514.360,00 |

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp | 420.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 4.224.984.910,00 |
| Jumlah setelah perubahan Sebesar | Rp | 4.644.984.910,00 |

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp | 288.000.000,00 |
| 2) Betambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan Sebesar | Rp | 288.000.000,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp | 1.085.799.939.288,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 22.147.178.479,30 |
| Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan | Rp | 1.107.927.117.767,30 |

b. Belanja Modal

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp | 318.087.687.123,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 115.867.487.576,00 |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan | Rp | 433.955.174.699,00 |

c. Belanja Tidak Terduga

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp | 3.012.002.602,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | (2.009.394.875,30) |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp | 1.002.607.726,70 |

d. Belanja Transfer

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp | 186.104.616.347,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 250.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan | Rp | 186.354.616.347,00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp | 681.119.759.165,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 1.870.160.538,30 |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp | 682.989.919.703,30 |

b. Belanja Barang dan Jasa

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Semula | Rp | 361.929.322.623,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 20.163.371.503,30 |
| Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan | Rp | 382.092.694.126,00 |
| c. Belanja Hibah | | |
| 1) Semula | Rp | 41.922.360.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 44.286.438,00 |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | Rp | 41.966.646.438,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial | | |
| 1) Semula | Rp | 808.497.500,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 69.360.000,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan | Rp | 877.857.500,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

| | | |
|---|---|---|
| a. Belanja Modal Tanah | | |
| 1) Semula | Rp | 3.725.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 9.905.159.000,00 |
| Jumlah Modal Tanah Setelah Perubahan | Rp | 13.630.159.000,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | |
| 1) Semula | Rp | 45.888.964.207,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 4.165.775.890,00 |
| Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan | Rp | 50.054.740.097,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | |
| 1) Semula | Rp | 186.041.701.316,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 11.855.816.295,00 |
| Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung Setelah Perubahan | Rp | 197.897.517.611,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | |
| 1) Semula | Rp | 77.057.350.944,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 92.421.243.747,00 |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan | Rp | 169.478.594.691,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | |
| 1) Semula | Rp | 5.264.670.656,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | (2.445.507.356,00) |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap lainnya Setelah Perubahan | Rp | 2.819.163.300,00 |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya | | |
| 1) Semula | Rp | 110.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | (35.000.000,00) |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Setelah Perubahan | Rp | 75.000.000,00 |

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. Semula | Rp | 3.012.002.602,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | (2.009.394.875,30) |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp | 1.002.607.726,70 |

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

| | | |
|---|---|---|
| a. Belanja bagi hasil | | |
| 1) Semula | Rp | 9.489.033.446,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan | Rp | 9.489.033.446,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan. | | |
| 1) Semula | Rp | 176.615.582.901,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 250.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan | Rp | 176.865.582.901,00 |

`Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

| | | |
|---|---|---|
| a. Penerimaan Pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 46.556.307.555,00 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp | 46.556.307.555,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

| | | |
|---|---|---|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 46.556.307.555,00 |
| Jumlah Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan | Rp | 46.556.307.555,00 |
| b. Penerimaan pinjaman daerah | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

| | | |
|---|---|---|
| a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Lebih Perhitungan | | |

| | | |
|---|---|---|
| Anggaran sebelumnya | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran perubahan APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lanpiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. LampiranVIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 12 September 2024

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 12 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.09.070.24.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

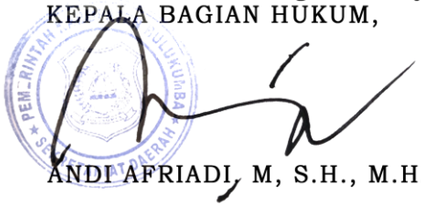

ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.